

LAMPIRAN VII. : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR : 19 TAHUN 2014  
TANGGAL : 30 MEI 2014

---

## **SISTEM AKUNTANSI NOMOR 07 AKUNTANSI PERSEDIAAN**

### **A. UMUM**

#### 1. Definisi

PSAP Nomor 05 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menyatakan bahwa persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

#### 2. Klasifikasi

Suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan manakala aset tersebut memenuhi salah satu kriteria yang disebutkan dalam PSAP Nomor 05, yaitu:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Termasuk dalam kelompok ini adalah barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak pakai habis seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi. Persediaan dalam kelompok ini meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan

alat-alat pertanian, dan lain-lain;

- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Contoh persediaan yang termasuk dalam kelompok ini adalah alat-alat pertanian setengah jadi;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Contohnya adalah hewan/tanaman.

Dalam Bagan Akun Standar Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Persediaan Bahan Pakai Habis	Persediaan Alat Tulis Kantor
	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
	Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)
	Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
	Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas
	Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran
	Persediaan Isi Tabung Gas
Persediaan Bahan/Material	Persediaan Bahan Baku Bangunan
	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman
	Persediaan Bibit Ternak
	Persediaan Bahan Obat-Obatan
	Persediaan Bahan Kimia
Persediaan Bahan Makanan Pokok	
Persediaan Barang Lainnya	Persediaan Barang yang akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga

## B. PIHAK –PIHAK YANG TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan antara lain adalah:

1. **Bendahara Barang atau Pengurus Barang**  
Dalam sistem akuntansi persediaan, bendahara barang/pengurus barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan persediaan.
2. **Bendahara Pengeluaran**  
Dalam sistem akuntansi persediaan, bendahara pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan persediaan.
3. **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**  
Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan persediaan.
4. **Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD**  
Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi persediaan yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.

### **C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN**

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi persediaan antara lain adalah:

1. **Bukti Belanja Persediaan**  
Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal pengakuan beban persediaan dan belanja persediaan dengan cara pembayaran UP.
2. **Berita Acara Serah Terima Barang**  
Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal atas pengakuan beban

persediaan dengan cara pembayaran LS.

3. Berita Acara Pemeriksaan Persediaan

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal penyesuaian untuk pengakuan beban persediaan setelah dilakukannya *stock opname*.

4. SP2D LS

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan belanja persediaan dengan cara pembayaran LS.

#### D. JURNAL STANDAR

1. Pencatatan Persediaan dengan Metode Periodik

Pembelian persediaan dapat dilakukan dengan menggunakan UP (Uang Persediaan) maupun LS (Langsung). Ketika SKPD melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan UP, bendahara pengeluaran SKPD akan menyerahkan bukti belanja persediaan kepada PPK SKPD. Bukti transaksi ini akan menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk melakukan pengakuan persediaan. PPK SKPD akan mencatat jurnal:

##### Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan ...	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

##### Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Persediaan ...	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Jika SKPD melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan LS, pengakuan persediaan dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang. Berita Acara Serah Terima Barang tersebut menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk menjurnal:

#### Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan ...	XXX	
		XXX	Utang Belanja Barang dan Jasa		XXX

Ketika SP2D LS untuk pembayaran persediaan telah terbit, PPK-SKPD akan menghapus utang belanja dengan menjurnal:

#### Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Barang dan Jasa	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

#### Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Persediaan ...	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Pada akhir periode (bulanan, triwulanan, semesteran), sebelum menyusun laporan keuangan, bagian gudang akan melakukan *stock opname* untuk mengetahui sisa persediaan yang dimiliki. Berdasarkan berita acara hasil perhitungan persediaan akhir tahun (*stock opname*), PPK-SKPD akan menjurnal sebagai berikut:

### Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Persediaan ...	XXX*	
		XXX	Persediaan ...		XXX

\*Sebesar persediaan yang dipakai

2. Pencatatan Persediaan dengan Metode Perpetual  
Ketika SKPD melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan UP, bendahara pengeluaran SKPD akan menyerahkan bukti belanja persediaan kepada PPK SKPD. Bukti transaksi ini akan menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk menjurnal:

### Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

### Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Persediaan ...	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Jika SKPD melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan LS, pengakuan persediaan dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang. Berita Acara Serah Terima Barang tersebut menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk menjurnal:

### Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan ...	XXX	
		XXX	Utang Belanja Barang dan Jasa		XXX

Ketika SP2D LS untuk pembayaran persediaan terbit, PPK-SKPD akan menjurnal:

#### Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Barang dan Jasa	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

#### Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Persediaan ...	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Berdasarkan dokumen yang menjelaskan penggunaan/pemakaian persediaan (untuk metode perpetual), seperti Kartu Inventaris Barang (KIB), Buku Inventaris (BI), dan kartu kendali barang, PPK SKPD akan mengakui beban persediaan sejumlah yang terpakai dengan menjurnal:

#### Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Persediaan ...	XXX	
		XXX	Persediaan ...		XXX

Jurnal standar dari setiap jenis transaksi terkait persediaan tersebut secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

#### Jurnal Standar Persediaan dengan Sistem Pencatatan Periodik

No	Transaksi	PENCATATAN OLEH SKPD			PENCATATAN OLEH PPKD		
		Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
1a	Pembelian Persediaan dengan uang UP/GU/TU	Persediaan	xxx		Tidak ada jurnal		
		Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx			
		Belanja Persediaan	xxx		Tidak ada jurnal		
		Perubahan SAL		xxx			
1b	Pembelian Persediaan dengan uang LS (Utang)	Persediaan	xxx		Tidak ada jurnal		
		Utang Belanja		xxx			
	Pelunasan Utang/Penerbitan SP2D LS Barang	Utang Belanja	xxx		RK PPKD	xxx	
		RK PPKD		xxx	Kas di kas Daerah		xxx
		Belanja Persediaan	xxx		Tidak ada jurnal		
		Perubahan SAL		xxx			
2	Pemakaian Persediaan	Tidak ada jurnal		Tidak ada jurnal			
3	Penyesuaian di Akhir Tahun	Beban Persediaan	xxx		Tidak ada jurnal		
		Persediaan		xxx			

## Jurnal Standar Persediaan dengan Sistem Pencatatan Perpetual

No	Transaksi	PENCATATAN OLEH SKPD			PENCATATAN OLEH PPKD		
		Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
1a	Pembelian Persediaan dengan uang UP/GU/TU	Persediaan	xxx		Tidak ada jurnal		
		Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx			
		Belanja Persediaan	xxx		Tidak ada jurnal		
		Perubahan SAL		xxx			
1b	Pembelian Persediaan dengan uang LS (Utang)	Persediaan	xxx		Tidak ada jurnal		
		Utang Belanja		xxx			
	Pelunasan Utang/Penerbitan SP2D LS Barang	Utang Belanja	xxx		RK PPKD	xxx	
		RK PPKD		xxx	Kas di kas Daerah		xxx
		Belanja Persediaan	xxx		Tidak ada jurnal		
		Perubahan SAL		xxx			
2	Pemakaian Persediaan	Persediaan			Tidak ada jurnal		
Beban Persediaan							
3	Penyesuaian di Akhir Tahun	Tidak ada jurnal		xxx	Tidak ada jurnal		
			xxx				

### E. ILUSTRASI

#### 1. Ilustrasi Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui saat potensi manfaat

ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Setiap pembelian persediaan akan dicatat sebagai aset, yakni "Persediaan". Berdasarkan bukti belanja persediaan, fungsi akuntansi akan menjurnal akun "Persediaan" di debit dan akun "Kas" atau akun "Utang" di kredit. Selain itu, fungsi akuntansi akan mencatat realisasi belanja dengan mendebit akun "Belanja (sesuai nama persediaan)" dan mengkredit akun "Perubahan SAL".

#### a. Ilustrasi Pengakuan Persediaan

Pada tanggal 1 Pebruari 2015, SKPD Kota Jaya membeli persediaan berupa 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol. Harga kertas HVS adalah Rp.50.000,00/rim dan harga spidol adalah Rp.100.000,00/pak. Selama Bulan Pebruari 2015 digunakan sebanyak 2 rim kertas HVS dan 3 pak spidol. Berdasarkan bukti belanja tersebut, fungsi akuntansi akan menjurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

#### Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Peb-15	1/BB/2015	1.1.7.01.01	Persediaan Alat Tulis Kantor	1.250.000	
		1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Pengeluaran		1.250.000

### Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Peb-15	1/BB/2015	5.1.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		1.250.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

### Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Peb-15	1/BB/2015	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		1.250.000

## 2. Ilustrasi Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai/dikonsumsi. Pendekatan aset disarankan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya selama satu periode dan atau untuk berjaga-jaga. Contohnya adalah persediaan di sekretariat SKPD, persediaan obat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban, yakni "Beban Persediaan". Berdasarkan bukti belanja persediaan, fungsi akuntansi akan menjurnal akun "Beban Persediaan" di debit dan akun "Kas" atau akun "Hutang" di kredit. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud

penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

a. Ilustrasi pengakuan beban persediaan dengan pendekatan aset

Pada tanggal 1 Pebruari 2015, SKPD ABC membeli persediaan sebanyak 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol untuk Sekretariat. Harga kertas HVS adalah Rp 50.000,00/rim dan harga spidol adalah Rp100.000,00/pak. Pada tanggal 15 Pebruari 2015, SKPD ABC menggunakan persediaan sebanyak 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol. Jurnal yang akan dibuat oleh fungsi akuntansi adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Peb-15	1/BB/2015	1.1.7.01.01	Persediaan Alat Tulis Kantor	1.250.000	
		1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Pengeluaran (Jurnal LO atau Neraca)		1.250.000
		5.1.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL (Jurnal LRA menggunakan kode rekening Permendagri)		1.250.000
		5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL (Jurnal LRA menggunakan kode rekening Permendagri)		1.250.000
15-Peb-15		9.1.2.01.01	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	1.250.000	
		3.1.2.05.01	Persediaan Alat Tulis Kantor (Jurnal LO atau Neraca)		1.250.000

b. Ilustrasi pengakuan beban persediaan dengan pendekatan beban

Pada tanggal 1 Pebruari 2015, SKPD Kota Jaya membeli persediaan berupa 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol untuk Kegiatan Pelatihan Akuntansi Akrual. Harga kertas HVS adalah Rp.50.000,00/rim dan harga spidol adalah Rp.100.000,00/pak. Berdasarkan bukti belanja tersebut, fungsi akuntansi akan menjurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

#### Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Peb-15	1/BB/2015	9.1.2.01.01	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	1.250.000	
		1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Pengeluaran		1.250.000

#### Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Peb-15	1/BB/2015	5.1.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		1.250.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006).

#### Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Peb-15	1/BB/2015	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		1.250.000

### 3. Ilustrasi Sistem Pencatatan Persediaan

Nilai persediaan dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan seiring dengan pemakaiannya. Pencatatan yang akurat sangat dibutuhkan untuk kelancaran operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam akuntansi persediaan, dikenal dua alternatif metode pencatatan persediaan yang dapat dilakukan untuk menjaga keakuratan catatan persediaan, yaitu:

#### a. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini umumnya digunakan untuk jenis persediaan berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, persediaan pupuk di Dinas Pertanian, dan lain sebagainya.

#### Ilustrasi Sistem Pencatatan Perpetual:

Pada tanggal 1 Desember 2015, Dinas Kesehatan Kota Jaya membeli obat-obatan senilai Rp.30.000.000,00. Pada tanggal 18 Desember 2015, terjadi pemakaian obat-obatan senilai Rp.10.000.000,00. Pada tanggal 31 Desember 2015, dilakukan *stock opname* obat-obatan dan diketahui bahwa obat-obatan yang tersisa di gudang adalah senilai Rp.20.000.000,00. Dinas Kesehatan Kota Jaya menggunakan metode perpetual untuk mencatat persediaan obat-obatan yang dimilikinya.

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Des-15	1/BB/2015	1.1.7.02.04	Persediaan Bahan Obat-obatan	30.000.000	
		1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Pengeluaran		30.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
		5.1.2.02.04	Belanja Persediaan Bahan Obat-obatan	30.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		30.000.000
			(Jurnal LRA dengan kode rekening Permendagri 64/2013)		
		5.2.2.02.03	Belanja Bahan Obat-obatan	30.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		30.000.000
			(Jurnal LRA dengan kode rekening Permendagri 13/2006)		
18-Des-15		9.1.2.02.04	Beban Persediaan Bahan Obat-obatan	10.000.000	
			Persediaan Bahan Obat-obatan		10.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
31-Des-15			Tidak ada jurnal		

### Pengakuan Selisih Persediaan

Melanjutkan ilustrasi di atas, hasil *stock opname* menunjukkan bahwa sisa obat-obatan adalah Rp.19.000.000,00. Hal ini berarti terjadi selisih Rp.1.000.000,00 dari jumlah yang seharusnya. Maka selisih ini akan diakui sebagai beban jika dipertimbangkan sebagai sesuatu yang normal. Jika selisih ini dianggap tidak normal maka selisih ini akan diakui sebagai kerugian daerah.

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31-Des-15	BA Pemeriksaan	9.1.2.02.04	Beban Persediaan Obat-obatan	1.000.000	
		1.1.7.02.04	Persediaan Bahan Obat-obatan		1.000.000
			(jika selisih persediaan tdk signifikan)		
			(Jurnal LO atau Neraca)		

31-Des-15	BA Pemeriksaan	9.4.1.01.03	Kerugian Daerah Beban Luar Biasa- Kerugian Daerah	1.000.000	
		1.1.7.02.04	Persediaan Bahan Obat-obatan (jika selisih persediaan signifikan)		1.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		

#### b. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini umumnya digunakan untuk jenis persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat.

#### Ilustrasi Sistem Pencatatan Periodik:

Jika Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan metode periodik untuk mencatat persediaan obat-obatan yang dimilikinya, maka pencatatannya adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Des-15	1/BB/15	9.1.2.02.04	Persediaan Bahan Obat-obatan	30.000.000	
		1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Pengeluaran (Jurnal LO atau Neraca)		30.000.000
		5.1.2.02.04	Belanja Persediaan Bahan Obat-obatan	30.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL (Jurnal LRA dengan kode rekening Permendagri 64/2013)		30.000.000
		5.2.2.02.03	Belanja Bahan Obat-obatan	30.000.000	

		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		30.000.000
			(Jurnal LRA dengan kode rekening Permendagri 13/2006)		
18-Des-15			Tidak ada jurnal		
31-Des-15		1.1.7.02.04	Beban Persediaan Bahan Obat-obatan	20.000.000	
		9.1.2.02.04	Persediaan Bahan Obat-obatan		20.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		

#### 4. Ilustrasi Pengukuran Persediaan

Nilai persediaan meliputi seluruh biaya yang harus dikeluarkan sampai barang tersebut dapat digunakan. PSAP Nomor 05 menyebutkan tiga alternatif untuk mengukur nilai persediaan, yaitu:

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian

Biaya perolehan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

#### Ilustrasi:

Pada tanggal 1 Pebruari 2015 Dinas Kesehatan membeli obat-obatan senilai Rp.100.000.000,00. Dari pembelian tersebut terdapat biaya lelang sebesar Rp.2.000.000,00. Fungsi akuntansi akan mencatat nilai persediaan sebesar:

$$\begin{aligned}\text{Biaya Perolehan} &= \text{Pembelian} + \text{biaya lelang} \\ &= \text{Rp.100.000.000,00} + \text{Rp.2.000.000,00} \\ &= \text{Rp.102.000.000,00}\end{aligned}$$

- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi; dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Biaya langsung dan tidak langsung dalam konteks ini berbeda dengan belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam APBD. Dalam konteks harga pokok produksi, biaya langsung adalah biaya yang langsung dapat ditelusuri ke dalam setiap unit produk, misalnya adalah biaya tenaga utama dan bahan baku utama. Sedangkan biaya tidak langsung (*overheadcost*) adalah biaya yang tidak dapat langsung ditelusuri ke setiap unit produk, misalnya biaya air, biaya listrik, biaya depresiasi gedung tempat produksi.

Ilustrasi:

Dinas Kehutanan memproduksi minyak kayu putih sendiri. Biaya untuk membuat minyak kayu putih terdiri atas bahan baku senilai Rp.75.000.000,00, gaji para pekerja sebesar Rp.25.000.000,00, serta biaya *overhead* senilai Rp.5.000.000,00.

Berdasarkan informasi tersebut, fungsi akuntansi akan mencatat nilai persediaan sebesar:

$$\begin{aligned}\text{Nilai} &= \text{Biaya Langsung} + \text{Biaya Tidak Langsung} \\ &= (\text{Rp.75.000.000} + \text{Rp.25.000.000} + \text{Rp.5.000.000}) \\ &= \text{Rp.105.000.000}\end{aligned}$$

- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Ilustrasi:

Dinas Pertanian menerima donasi berupa pupuk dari pabrik pupuk sebanyak 100 ton. Berdasarkan hasil survei di pasar, harga pupuk per ton adalah Rp.1.000.000,00. Berdasarkan informasi tersebut, fungsi akuntansi akan mencatat nilai persediaan pupuk sebesar 100 ton x Rp.1.000.000,00 atau Rp.1.000.000.000,00.

5. Ilustrasi Penilaian

Dalam satu periode, pemerintah daerah melakukan beberapa kali pembelian persediaan dengan tingkat harga yang berbeda-beda antara pembelian yang satu dengan yang lain. Perbedaan tingkat harga tersebut menjadi permasalahan tersendiri dalam melakukan penilaian persediaan. Harga mana yang akan

dipakai untuk menilai beban persediaan yang telah dipakai/dijual/diserahkan dan harga mana yang akan dipakai untuk menilai persediaan yang tersisa diakhir periode?

### Ilustrasi:

Berikut ini adalah data pembelian dan penggunaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan:

Tanggal	Pembelian	Penggunaan	Jumlah
15 Maret 2015	100 dus @ Rp 100.000		100 dus
20 April 2015	200 dus @ Rp 150.000		300 dus
17 Juni 2015		150 dus	150 dus
8 Agustus 2015	300 dus @ Rp 200.000		450 dus
13 September 2015		100 dus	350 dus

Dari data di atas, diketahui bahwa persediaan aktiva obat-obatan yang dimiliki oleh Dinas kesehatan adalah sebanyak 350 dus. Yang menjadi pertanyaan adalah pada harga mana yang akan dipakai untuk menghitung beban persediaan dan nilai persediaan?

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, PSAP Nomor 05 menyebutkan tiga metode yang dapat digunakan untuk menentukan nilai persediaan akhir. Ketiga metode tersebut adalah:

a. **Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP)**

Dalam metode ini, nilai barang-barang yang pertama kali dibeli merupakan nilai barang yang dipakai/dijual/diserahkan pertama kali. Dengan demikian nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

**Ilustrasi:**

Berikut adalah data obat-obatan Dinas Kesehatan

Tanggal	Pembelian	Penggunaan	Jumlah
15 Maret 2015	100 dus @ Rp 100.000,00		100 dus
20 April 2015	200 dus @ Rp 150.000,00		300 dus
17 Juni 2015		150 dus	150 dus
8 Agustus 2015	300 dus @ Rp 200.000,00		450 dus
13 September 2015		100 dus	350 dus

Jika Dinas Kesehatan menggunakan Metode Periodik dalam pencatatan persediaannya dan MPKP sebagai penilaian persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan obat-obatan Dinas Kesehatan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Dengan metode MPKP, 350 dus persediaan obat-obatan yang tersisa tersebut dihitung mulai dari harga pembelian terakhir.

Tanggal	Jumlah Unit	Harga Per Unit	Total Harga
8 Agustus 2015	300 dus	Rp.200.000,00	Rp.60.000.000,00
20 April 2015	50 dus	Rp.150.000,00	Rp. 7.500.000,00
Persediaan Akhir	350 dus		Rp. 67.500.000,00

Untuk obat-obatan yang telah dipakai, beban persediaannya adalah:

$$\text{Beban Persediaan} = \text{Persediaan Awal} + \text{Pembelian} - \text{Persediaan Akhir}$$

$$\begin{aligned} \text{Beban Persediaan} &= 0 + \{(100 \times \text{Rp.100.000,00}) + \\ &\quad (200 \times \text{Rp.150.000,00}) + (300 \times \\ &\quad \text{Rp.200.000,00})\} - \text{Rp.67.500.000,00} \\ &= \text{Rp.32.500.000,00} \end{aligned}$$

Jika Dinas Kesehatan menggunakan Metode

Perpetual dalam pencatatan persediaannya dan MPKP sebagai metode penilaian persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan obat-obatan Dinas Kesehatan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Pembelian	Penggunaan	Jumlah
15 Maret 2015	(100 dus @Rp.100.000,00) Rp.10.000.000,0		(100 dus @Rp.100.000,00) Rp.10.000.000,0
20 April 2015	(200 dus @Rp.150.000,00) Rp.30.000.000,00		(100 dus @Rp.100.000,00) (200 dus @Rp.150.000,00) Rp.40.000.000,00
17 Juni 2015		(100 dus @Rp.100.000,00) (50 dus @Rp.150.000,00) Rp.17.500.000,00	(150 dus @Rp.150.000,00) Rp.22.500.000,00
8 Agustus 2015	(300 dus @Rp.200.000,00) Rp.60.000.000,00		(150 dus @Rp.150.000,00) (300 dus @Rp.200.000,00) Rp.82.500.000,00
13 September 2015		(100 dus @Rp.150.000,00) Rp.15.000.000,00	(50 dus @Rp.150.000,00) (300 dus @Rp.200.000,00) Rp.67.500.000,00

Jadi, nilai persediaan akhir obat-obatan Dinas Kesehatan adalah Rp.67.500.000,00 dan beban persediaannya adalah Rp.32.500.000,00 (Rp.17.500.000,00 + Rp.15.000.000,00).

b. Metode Rata-Rata Tertimbang

Dalam metode ini, harga pokok merupakan

harga rata-rata dari keseluruhan barang yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian nilai persediaan dihitung juga berdasarkan harga rata-rata.

### Ilustrasi:

Berikut adalah data obat-obatan Dinas Kesehatan

Tanggal	Jumlah Unit	Penggunaan	Jumlah
15 Maret 2015	100 dus @ Rp.100.000,00		100 dus
20 April 2015	200 dus @ Rp.150.000,00		300 dus
17 Juni 2015		150 dus	150 dus
8 Agustus 2015	300 dus @ Rp.200.000,00		450 dus
13 September 2015		100 dus	350 dus

Jika Dinas Kesehatan menggunakan Metode Periodik dalam pencatatan persediaannya dan Rata-Rata Tertimbang sebagai penilaian persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan obat-obatan Dinas Kesehatan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah Unit	Harga Per Unit	Total Harga
15 Maret 2015	100 dus	Rp.100.000,00	Rp.10.000.000,00
20 April 2015	200 dus	Rp.150.000,00	Rp.30.000.000,00
8 Agustus 2015	300 dus	Rp.200.000,00	Rp.60.000.000,00
Total	600 dus		Rp.100.000.000,00

Biaya rata-rata

persediaan per unit

$$= \text{Rp.166.666,67}$$

Nilai Persediaan

$$= \text{Biaya rata-rata per unit} \times \text{persediaan akhir}$$

$$= \text{Rp.166.666,67} \times 350 \text{ unit}$$

$$= \text{Rp.58.333.333,33}$$

$$= \text{Rp.}100.000.000,00/600 \text{ dus}$$

Untuk obat-obatan yang telah dipakai,  
beban persediaannya adalah:

$$\text{Beban Persediaan} = \text{Persediaan Awal} + \text{Pembelian} - \text{Persediaan}$$

A  
k  
h  
i  
r

$$\text{Beban Persediaan} = 0 + \text{Rp.}100.000.000 - \text{Rp.}58.333.333,33$$

=

$$\text{Rp.}41.666.666,67$$

Jika Dinas Kesehatan menggunakan Metode Perpetual dalam pencatatan persediaannya dan Metode Rata-Rata sebagai penilaian persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan obat-obatan Dinas Kesehatan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Pembelian	Penggunaan	Jumlah
15 Maret2015	(100 dus @Rp.100.000,00) Rp.10.000.000,0		(100 dus @Rp.100.000,00) Rp.10.000.000
20 April2015	(200 dus @Rp.150.000,00) Rp.30.000.000		(300 dus @Rp.133.333,33*) Rp.40.000.000
17 Juni2015		(150 dus @Rp.133.333,33) Rp.20.000.000	(150 dus @Rp.133.333,33) Rp.20.000.000
8 Agustus2015	(300 dus @Rp.200.000) Rp.60.000.000		(450 dus @Rp.177.777,78**) Rp.80.000.000
13 September2015		(100 dus @Rp.177.777,78) Rp.17.777.777,7	(350 dus @Rp.177.777,78) Rp.62.222.222,22

\*Rp.40.000.000,00/300 dus

\*\*Rp.80.000.000,00/450 dus

Jadi, nilai persediaan akhir obat-obatan Dinas Kesehatan adalah Rp.62.222.222,22 dan beban persediaannya adalah Rp.37.777.777,78 (Rp.20.000.000,00 + Rp.17.777.777,78).

### c. Harga Pembelian Terakhir

Apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis. Nilai persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir.

#### Ilustrasi:

Berikut adalah data obat-obatan Dinas Kesehatan

Tanggal	Pembelian	Penggunaan	Jumlah
15 Maret 2015	100 dus @ Rp100.000,00		100 dus
20 April 2015	200 dus @ Rp150.000,00		300 dus
17 Juni 2015		150 dus	150 dus
8 Agustus 2015	300 dus @ Rp200.000,00		450 dus
13 September 2015		100 dus	350 dus

Jika Dinas kesehatan menggunakan Metode Periodik dalam pencatatan persediaannya dan Metode Harga Pembelian terakhir sebagai metode penilaian persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan obat-obatan Dinas Kesehatan Kota Jaya selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Nilai Persediaan Akhir = Rp.70.000.000,00 (350  
dus x

Rp.200.000.000,00)

Untuk obat-obatan yang telah dipakai, beban persediaannya adalah:

Beban Persediaan = Perediaan Awal + Pembelian -  
Persediaan Akhir

$$\begin{aligned}
 \text{Beban Persediaan} &= 0 + \{(100 \times \text{Rp.100.000,00}) + (200 \times \\
 &\quad \text{Rp.150.000,00}) + (300 \times \\
 &\quad \text{Rp.200.000,00})\} - \text{Rp.70.000.000,00} \\
 &= \text{Rp.30.000.000,00}
 \end{aligned}$$

Jika Dinas Kesehatan menggunakan Metode Perpetual dalam pencatatan persediaannya dan Harga Pembelian Terakhir sebagai metode penilaian persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan obat-obatan Dinas Kesehatan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Pembelian	Penggunaan	Jumlah
15 Maret 2015	(100 dus @Rp.100.000,00) Rp.10.000.000,00		(100 dus @Rp.100.000,00) Rp.10.000.000,00
20 April 2015	(200 dus @Rp.150.000,00) Rp.30.000.000,00		(100 dus @Rp.100.000,00) (200 dus @Rp.150.000,00) Rp.40.000.000,00
17 Juni 2015		150 dus (Rp.40.000.000,00 – Rp.22.500.000,00) Rp 17.500.000,00	(150 dus @Rp.150.000,00) Rp.22.500.000,00
8 Agustus 2015	(300 dus @Rp.200.000,00) Rp.60.000.000,00		(150 dus @Rp.175.000,00) (300 dus @Rp.200.000,00) Rp.86.250.000,00
13 September 2015		100 dus (Rp.86.250.000,00 – Rp.70.000.000,00) Rp.16.250.000,00	(350 dus @Rp.200.000,00) Rp.70.000.000,00

Jadi, nilai persediaan akhir obat-obatan Dinas Kesehatan adalah Rp.70.000.000,00 dan beban persediaannya adalah Rp.33.750.000,00 (Rp.17.500.000,00 + Rp.16.250.000,00).

- 3) Kondisi persediaan. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Hal-hal tersebut di atas tidak dilaporkan dalam Neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Ilustrasi Pengungkapan Persediaan pada Neraca SKPD:

PERSEDIAAN						
Metode pencatatan persediaan menggunakan Metode Periodik. Pengukuran nilai persediaan menggunakan Metode Harga Pembelian Terakhir.						
Persediaan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari:						
No	Nama	Peruntukan	Kondisi	Volume	Harga/unit	Nilai
1.	Kertas	Pelayanan	Baik	2 rim	Rp.50.000	Rp.50.000
2.	Bibit Tanaman	Diserahkan kepada masyarakat	Baik	80 unit	Rp.10.000	Rp. 800.000

Ilustrasi Pengungkapan pada Neraca Pemda:

PERSEDIAAN		
Persediaan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terdiri dari:		
No	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan	Rp. 4.000.000,00
2.	Dinas Kesehatan	Rp.2.000.000,00
3.	.....	Rp. ....

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**AGUSTIN TERAS NARANG**